



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BULELENG

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BULELENG

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi nyata capaian pembangunan tahun sebelumnya. Pembangunan sebelumnya telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.





Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir seperti yang telah diuraikan pada BAB II antara lain sebagai berikut :

3.1.1 Sekretariat

1. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
2. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.
3. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng belum optimal.
4. Belum optimalnya data dan informasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3.1.2 Bidang Bina Marga

1. Terus berkembangnya jumlah jalan kabupaten mengakibatkan pencapaian tingkat kemantapan jalan kabupaten yang pada akhir tahun 2017 hanya 69,72% yaitu hanya ada jalan yang mantap sepanjang 780,730 km dari total panjang jalan 1.119,94 km. Hal ini dipengaruhi oleh penambahan jumlah panjang ruas jalan kabupaten yang sebelumnya berjumlah 999,95 km di tahun 2016 bertambah menjadi 1.119,94 km di akhir tahun 2017 sehingga persentase kemantapan jalan menjadi lebih kecil dari tahun





sebelumnya, meskipun jumlah kemantapan jalan telah bertambah dari tahun-tahun sebelumnya.

3.1.3 Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

1. Terus berkembangnya jumlah pertambahan penduduk sehingga mempengaruhi pencapaian tingkat pelayanan air minum perpipaan yang pada akhir tahun 2017 hanya 82,97 % yaitu telah melayani 675.649 jiwa dari total 814.307 jiwa.
2. Belum meratanya pelayanan air perpipaan pada semua wilayah kecamatan terutama di kecamatan Gerokgak, Seririt, Banjar, dan Tejakula.
3. Belum optimalnya pencapaian tingkat pelayanan dan penanganan kawasan daerah genangan banjir yang pada akhir tahun 2017 hanya 19,83 % yaitu hanya ada saluran drainase dalam kondisi baik sepanjang 240.790 meter dari total panjang saluran drainase baik kewenangan Nasional, Provinsi dan Kabupaten di Buleleng yaitu sepanjang 1.214.106 meter. Beberapa titik rawan banjir dan genangan akibat kondisi drainase yang buruk yaitu :
 - Kecamatan Gerokgak pada Desa Pemuteran, Desa Patas, Desa Celukan Bawang
 - Kecamatan Buleleng pada Kelurahan Banjar Tegal, Kelurahan Kendran, Kelurahan Kaliuntu, Kelurahan Banyuning, Kelurahan Kampung Baru, dan Desa Baktiseraga.
 - Kecamatan Sukasada pada Desa Pancasari.

3.1.4 Bidang Sumber Daya Air

1. Belum optimalnya pencapaian tingkat kemantapan infrastruktur irigasi yang pada akhir tahun 2017 hanya 74,55 % yaitu hanya ada saluran irigasi dalam kondisi mantap sepanjang 445.105 meter dari total target sepanjang 597.033 meter.





3.1.5 Bidang Penataan Ruang dan Bangunan

.....

3.1.6 Bidang Penerangan Jalan Umum

1. Belum optimalnya pemasangan lampu penerangan jalan umum yang pada akhir tahun 2017 hanya 81,17 % yaitu hanya terpasang lampu penerangan jalan umum sebanyak 12.010 titik dari total target sebanyak 14.797 titik.

DRAFT



3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng yang dapat mempengaruhi pencapaian target tujuan dan target sasaran dari visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Buleleng tersebut.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng yang dapat mempengaruhi pencapaian target tujuan dan target sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian target tujuan dan target sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.2.1 Visi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders. Visi mempunyai jangkauan 5 tahun atau lebih ke depan



dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (setting) daerah di masa depan.

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2018-2022 dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

**" TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI SEJAHTERA
DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA"**

Visi pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 ini menjadi arah cita-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan.

Arah menuju visi tersebut dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut :

NO	KONDISI 5 TAHUN KEDEPAN	PERAN DINAS PU KAB. BULELENG
1	2	3
1	Mandiri , mengandung makna : Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pencapaian kondisi " MANDIRI " melalui kegiatan-kegiatan yang mengikutkan masyarakat sehingga menjadi motor penggerak pembangunan
2	Sejahtera , mengandung makna :	Melalui Penanganan Infrastruktur Pekerjaan Umum diharapkan





	Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.	dapat membantu dalam mewujudkan pencapaian kondisi " SEJAHTERA ".
3	Berdaya saing , mengandung makna: Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.	Melalui Penanganan Infrastruktur Pekerjaan Umum diharapkan dapat lebih menggali Potensi-potensi yang ada yang belum ter-ekspos sehingga dapat mewujudkan kondisi " BERDAYA SAING " terhadap persaingan lokal maupun regional.

3.2.2 Misi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
6. Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berkelanjutan (sustainable development).





Dari 6 (enam) Misi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng tersebut di atas, maka misi ke lima adalah misi yang harus diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng. Misi ke lima dan ke enam tersebut dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan Buleleng yang berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Pekerjaan Umum, berperan dalam mewujudkan pembangunan Buleleng yang berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pada urusan pekerjaan umum, penataan ruang melalui :

1. Tercapainya tingkat kemantapan jalan kabupaten
2. Tercapainya tingkat pelayanan air minum
3. Terwujudnya perencanaan tata ruang
4. Terlaksananya pengendalian tata ruang
5. Tercapainya tingkat pelayanan dan penanganan kawasan daerah genangan banjir
6. Tercapainya tingkat kemantapan infrastruktur irigasi
7. Terwujudnya pemasangan dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng didasarkan pada Indikasi Program Utama Penataan Ruang Kabupaten Buleleng yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng, yaitu :





3.3.1 Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng

Bagian yang perlu diperhatikan pada perwujudan struktur ruang wilayah Kabupaten Buleleng yang terkait dengan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng adalah Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah. Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah yang dijabarkan melalui :

- a. Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi Darat dengan indikasi program utama yang sesuai Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu :
 - Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- b. Perwujudan Sistem Prasarana Sumber Daya Air dengan indikasi program utama yang sesuai Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu :
 - Pemantapan dan Pengembangan Prasarana Irigasi Sawah dan Non Sawah
 - Pengembangan Prasarana Pengendalian Daya Rusak Air
- c. Perwujudan Sistem Prasarana Lingkungan dengan indikasi program utama yang sesuai Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu :
 - Pembangunan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM)
 - Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan

3.3.2 Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng

Bagian yang perlu diperhatikan pada Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng yang terkait dengan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng adalah Perwujudan Kawasan Budidaya. Perwujudan Kawasan Budidaya yang dijabarkan melalui :

- a. Perwujudan Kawasan Peruntukkan Permukiman dengan indikasi program utama yang sesuai Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu :





- Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan
- Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan

3.4 **PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan





pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut

3.4.1 Isu Strategis Bidang Sumber Daya Air

1. Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal karena adanya kerusakan jaringan irigasi yang antara lain diakibatkan oleh umur konstruksi, bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan belum optimalnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi.
2. Perubahan garis pantai akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai. Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur pengairan yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor.
3. Mempertahankan kemampuan penyediaan air untuk irigasi dari sumber-sumber air yang semakin berkurang sebagai dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadiah-wadiah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat.



4. Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan pengairan untuk mengurangi konflik antar pengguna sumber daya air.
5. Mencari peluang-peluang investasi baru dalam upaya pengembangan infrastruktur pengairan.

3.4.2 Isu Strategis Bidang Bina Marga

1. Mulai banyaknya titik kepadatan lalu-lintas pada jaringan jalan di perkotaan Singaraja, yaitu jalan akses yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pendidikan.
2. Pembebanan berlebih (*overloading*) masih terjadi terutama pada lintas jalan bagian timur dan bagian barat Kabupaten Buleleng yang dilalui oleh mobil-mobil truk pengangkut galian C.
3. Meningkatkan aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil, serta jaringan jalan di kawasan perbatasan Kabupaten Buleleng bagian selatan.
4. Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.
5. Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan pemanfaatan ruang jalan (ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan di sepanjang koridor jaringan jalan).
6. Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan amanat RTRW Kabupaten Buleleng.

3.4.3 Isu Strategis Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan





1. Meningkatkan cakupan terhadap akses air minum sesuai dengan target *Universal Access* yaitu 100% akses di tahun 2019
2. Menyediakan produk hukum terutama regulasi pemanfaatan air minum terutama untuk sistem perdesaan terkait pembagian antara kebutuhan air minum dan pertanian.
3. Belum optimalnya penerapan Perda Kabupaten Buleleng No. 1 tahun 2013 tentang persampahan dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara saluran-saluran drainase jalan sehingga sering terjadinya penyumbatan pada saluran drainase yang mengakibatkan meluapnya air ke permukaan pada saat musim hujan.

3.4.4 Isu Strategis Bidang Penataan Ruang dan Bangunan

1. Mengembangkan peraturan Zonasi Kawasan yang memiliki potensi galian yang diselaraskan dengan RTRW Kabupaten Buleleng.
2. Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.
3. Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui pendekatan sosial budaya guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
4. Permukiman kumuh yang semakin meluas, Luas lahan perkotaan yang terbatas tidak mampu menampung desakan pertumbuhan penduduk dan pada akhirnya kerap memunculkan permukiman yang tidak teratur, kumuh, tidak layak huni dan tidak sesuai dengan peraturan Tata Ruang.

3.4.5 Isu Strategis Bidang Penerangan Jalan Umum

1. Banyaknya ruas jalan yang belum dilengkapi dengan Lampu Penerangan Jalan Umum.





2. Meningkatkan meterisasi dan penggunaan Lampu Hemat Energi pada Lampu Penerangan Jalan Umum untuk meningkatkan efisiensi pembayaran Rekening LPJU.

DRAFT